

BAB V

DATABASE DESA SUDIMORO DALAM SOROTAN

Menurut Payne seperti dikutip Abu Huraerah, bahwa tujuan dasar pemberdayaan adalah keadilan sosial dengan memberikan ketentraman kepada masyarakat yang lebih besar serta persamaan politik dan sosial melalui upaya saling membantu dan belajar melalui pengembangan langkah-langkah kecil guna tercapainya tujuan yang lebih besar.¹¹² Sementara yang terjadi selama ini di Desa Sudimoro merupakan wujud ketidakadilan yang menimpa masyarakat terkait program-program pembangunan yang terkadang menjadi masalah, yang hanya menjadi bahan *ngguneman*¹¹³ masyarakat, dan walau paham tentang “ketidaksehatan” kondisi yang terjadi, masyarakat seolah terhipnotis, tetap bungkam. Sedangkan kesadaran beberapa warga tentang “ketidaksehatan” itu tidak mampu menerobos dinding bernama kebijakan pemerintah yang telah diketok. Ketika masyarakat merasa tidak berdaya, mereka cenderung menyetujui saja tanpa bersikap kritis dan kehilangan rasa kendali atas kehidupan mereka.

Adanya pengetahuan bahwa yang terjadi sebenarnya jauh dari kebenaran, namun tidak mampu merumuskan tindakan untuk perubahan desa. Permasalahn database desa menjadi masalah yang krusial. Bagaimana tidak? Segala pengambilan keputusan

¹¹² Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat....*, hal. 99

¹¹³ *Nguneman* (Bahasa Jawa): perbincangan

atau kebijakan tentu membutuhkan informasi tentang apa yang sedang dihadapi, bagaimana kondisi masyarakat sebenarnya.

A. Penyebab Lemahnya Database Desa Sudimoro

Indonesia memang merupakan salah satu negara yang menerapkan model pembangunan yang banyak dikritik oleh banyak pihak. Seperti konsep *trickle down effect* (tetesan ke bawah), memberi bantuan materi seperti lewat BLT, yang memberikan remah-remah pembangunan kepada masyarakat kepada kelompok marginal masih saja diulang, padahal pola pembangunan ini tidak menyelesaikan masalah. Konsep pembangunan yang bersifat *top-down* ini harus segera digeser agar tidak menyisakan banyak masalah. Konsep *top-down* bersifat memaksa dan tidak aspiratif terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat¹¹⁴.

Berdasarkan hasil FGD bersama masyarakat Desa Sudimoro pada 30 Juni 2013¹¹⁵ melalui teknik pohon masalah terdapat beberapa permasalahan. Inti masalahnya adalah belum adanya sistem data base sosial-spasial Desa Sudimoro. Adapun masalah terkait disebabkan hal-hal berikut:

1. Terbatasnya Dukungan Masyarakat Terhadap Program Pembangunan

Partisipasi adalah kerja sama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil

¹¹⁴ Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat....*, hal. 15

¹¹⁵ FGD dilakukan bersama warga dan Karang Taruna Dukuh Jembangan pada 30 Juni 2013, pukul 20.00 WIB, dihadiri oleh 7 orang dari karang taruna dan 2 orang warga. Bertempat di rumah Slamet RT 15 Dukuh Jembangan.

pembangunan.¹¹⁶ Lebih lanjut Sulaiman seperti dikutip Abu Huraerah, mendefinisikan partisipasi sosial sebagai keterlibatan aktif warga masyarakat secara perseorangan, kelompok atau dalam kesatuan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan bersama, perencanaan dan pelaksanaan program serta usaha pelayanan dan pembangunan kesejahteraan sosial di dalam dan atau di luar lingkungan masyarakat atas dasar rasa kesadaran tanggung jawab sosialnya.¹¹⁷

Dikalangan masyarakat, masih muncul budaya diam yang salah manifestasinya adalah keengganan masyarakat untuk mengevaluasi proses pembangunan secara kritis dan terbuka, terlebih-lebih apabila kritik itu diucapkan di muka pejabat. Di kalangan aparat pemerintah sendiri muncul budaya mencari *selamat* dalam artian ketakutan kehilangan jabatan karena dianggap gagal melaksanakan pembangunan.

Lemahnya kemauan rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan berakar pada banyaknya peraturan atau perundang-undangan yang meredam keinginan rakyat untuk berpartisipasi. Contohnya, Undang-undang No. 5 Tahun 1979. Undang-undang ini membuat kekuasaan kepala desa dan aparatnya semakin kuat sehingga menimbulkan rakyat atau warga pedesaan enggan untuk menyampaikan kritik terkait pembangunan yang terjadi di desa mereka. Dengan meredam dinamika pembangunan yang ada di masyarakat pedesaan mengakibatkan masyarakat rendah kemauannya untuk berpartisipasi.

¹¹⁶ Loekman Sutrisno, *Menuju Masyarakat Partisipatif....*, hal. 207

¹¹⁷ Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat....*, hal. 110

Dampak Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tersebut sampai saat ini masih dirasakan masyarakat pedesaan Sudimoro. Walaupun saat ini, seiring berjalannya waktu kekuasaan kepala desa dan aparatnya tidak menunjukkan sikap otoriter. Namun, sikap otoriter pemerintah orde baru telah menyisakan trauma pada masyarakat, termasuk penduduk Sudimoro yang pernah mengalami bagaimana pedihnya sikap pemerintahan otoriter pemerintah di waktu mereka masih muda bahwa barang siapa yang berani protes, demo, atau mengkritik pemerintah maka akan tertimpa hal yang buruk. Hal yang cukup berbeda terjadi di masa pemerintahan kepala desa dan aparatnya saat ini. Dinamika pembangunan terlihat lebih sehat. Sebagian masyarakat mulai menyampaikan aspirasi, pendapat, ataupun kritik terkait pembangunan desa. Kritik, pendapat atau aspirasi ini disampaikan melalui lembaga-lembaga lokal yang ada di desa. Hubungan mereka pun cukup baik dengan pemerintah desa. Namun, bagi masyarakat awam lainnya ketika merasakan ada sesuatu yang janggal dengan pelaksanaan program pembangunan dan masalah sosial yang terjadi di desa, mereka hanya bisa diam. Pasrah. Takut berbuat, jika salah mereka akan mendapat sindiran warga lain atau mereka takut jika tidak mendapat pelayanan yang maksimal dari perangkat desa saat membutuhkan bantuan pemerintah desa bila membuat KTP, surat-surat atau takut bila suatu hari bantuan yang mereka dapatkan seperti bantuan raskin tidak didapatkan kembali..

Dilihat dari tingkat partisipasinya, dapat dikatakan terlihat masih kurang. Masyarakat memahami bahwa semua hal yang terkait dengan program

pembangunan, adminitrasi desa, pengelolaan desa merupakan urusan pemerintah desa. Karena merekalah yang berani maju mencalonkan diri, yang telah ditunjuk oleh masyarakat dan mereka bersedia. Ada pemahaman bahwa tanggung jawab pemerintah desa lebih tinggi dibanding masyarakat yang dipimpinnya. Hal inilah yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi warga Sudimoro. Sebagaimana yang disampaikan Wiyono (50 tahun), selaku ketua RT 7 di Dukuh Maduan. Ia merasa enggan untuk mengikuti musyawarah bersama kelompok tani atau pemerintah desa dikarenakan pendapatnya tidak pernah diperhatikan. Bapak dari tiga orang anak ini menjelaskan, setiap ada pertemuan rutin kelompok tani wilayah Dusun II, pengurus kelompok tani termasuk Kepala Desa Sudimoro selalu membahas pertanian tentang aliran irigasi di dukuh lain, sedangkan wilayah persawahan RT 7 tidak pernah dibahas dalam rapat. Hal ini menjadi salah satu sebab produksi sawah warga Maduan kurang di banding dukuh lainnya karena sawah tidak mendapat air yang cukup. Wiyono mengungkapkan,

“Saya sering mengusulkan untuk memperhatikan irigasi sawah di persawahan Maduan, kok tidak adil, dukuh lain lancar irigasinya sedangkan wilayah RT saya tidak. Tapi usulan saya tidak digubris. Jujur saja, daripada datang tapi pendapat tidak didengarkan ya sekarang saya tidak ikut rapat lagi.”¹¹⁸

Walaupun demikian, kepala desa tetap berat hati bila lelaki yang bekerja sebagai tenaga pengopen tembakau ini tidak aktif dalam kegiatan desa. Wiyono

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Wiyono (50 tahun), Ketua RT 7, pada 16 Desember 2013. Pukul 16.30 WIB

termasuk orang yang diperhitungkan oleh kepala Desa Sudimoro. Selain sebagai tetangga dekat kepala desa, rumahnya hanya berjarak tiga rumah dari rumah kepala desa, ia merupakan pribadi yang dipandang ringan tangan dan ketua RT yang bertindak cepat dan tidak meremehkan kebutuhan atau pembangunan menyangkut RT 7 Dukuh Maduan. Selain itu, pribadinya yang ramah dan religius membuat masyarakat percaya padanya.

Di samping yang telah dikemukakan di atas, hal lain yang menyebabkan partisipasi masyarakat dalam kategori rendah adalah adanya pemahaman mengenai konsep partisipasi oleh pemerintah selaku pihak perencana dan pelaksana pembangunan. Konsep yang dipahami adalah masyarakat harus secara mutlak mendukung dan menerima program-program pemerintah yang dirancang dan ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah mungkin bertujuan untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Tetapi dalam pelaksanaannya partisipasi yang dimaksud adalah partisipasi yang diukur dengan kemauan masyarakat untuk ikut menanggung biaya pembangunan, baik berupa uang, tenaga atau barang lain. Misalnya dalam proses pembangunan jalan desa yang digagas dari program PNPM Mandiri, masyarakat menambahi kekurangan biaya dengan iuran. Setiap KK yang diwakili ibu-ibu menyediakan makanan atau minuman untuk para tenaga pembangunan jalan, ini dilakukan secara bergantian dari masing-masing rumah dan para lelaki menyumbangkan tenaga.

2. Lemahnya Sistem Pengelolaan Database Pada Tingkat Pemerintah Desa

a. Lemahnya Keterampilan Pemerintah Desa

Desa sebagai organisasi pemerintah terendah merupakan tumpuan segenap pelaksana urusan pemerintahan dan pembangunan. Dengan berbagai potensi sumberdaya yang dimilikinya, maka pemerintah desa ditingkatkan kemampuannya supaya lebih mampu dalam menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi desa yang makin bertambah luas dan efektif. Keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan di desa sangat ditentukan oleh terwujudnya pemerintahan desa yang berdaya guna dan berhasil guna.¹¹⁹

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II, data merupakan suatu keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan).¹²⁰ Dengan data, bagi pemerintah atau kalangan bisnis, bisa dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan data, instansi pemerintah baik instansi pemerintah tertinggi sampai terendah bisa membuat program yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Jadi, tidak bisa lagi memanipulasi anggaran. Selain terkait anggaran, data dibutuhkan untuk mengetahui potensi, kecenderungan kondisi masyarakat baik kondisi ekonomi, sosial, politik pembangunan, dan aset atau sumberdaya yang dimiliki; sumberdaya manusia,

¹¹⁹ Rahardjo Adisasmita, *Membangun Desa Partisipatif....*, hal. 121

¹²⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia....*, hal. 239

sumberdaya alam, sumberdaya sosial, sumberdaya infrastruktur, dan sumberdaya keuangan.

Desa yang didalamnya terdapat kepala desa, dan perangkat desa sebagai stafnya tentu dalam menjalankan roda kepemimpinan memiliki tugas dan fungsi yang diemban. Instansi pemerintah tingkat terendah ini pula yang lebih mengetahui tentang kondisi masyarakat yang di bawahnya dibanding pemerintah pusat.

Sementara mengenai administrasi desa, seperti yang telah disinggung di atas. Masyarakat memahami bahwa soal administrasi itu urusan perangkat desa, baik oleh kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, kepala dusun, dan ketua RT. Seperti yang diungkapkan oleh Supadi (65 tahun), ketua RT 12, *“nggeh datane niku wonten ten nggene deso, kulo namung nggadah data niki”* (ya datanya itu ada di pemerintah desa, saya hanya punya ini), ungkap Supadi seraya menunjukkan satu eksemplar kertas berisi data daftar pemilu tahun 2009. Bahkan kepala dusun atau ketua RT terkadang tidak paham dengan urusan kependudukan warganya. Hal ini terbukti saat pihak luar menanyakan tentang data warga RT kepada kepala dusun dan ketua RT, mereka malah meminta untuk menanyakan pada pemerintah desa. Biasanya ketua RT memiliki data warganya dari desa berupa beberapa lembar salinan data daftar pemilih tetap untuk pemilu atau pilkada. Berbekal lembaran data inilah jika ketua RT ditanya tentang kondisi demografi; jumlah warga, jumlah perempuan dan laki-laki, data NIK dan alamat, lembar kertas inilah yang mereka sodorkan pada penulis. Ketika ditanya apakah

bapak tidak memiliki data sendiri yang lebih lengkap dari data daftar pemilih misalnya jumlah kelahiran kematian bayi dalam satu bulan terakhir, atau data anak sekolah. Hampir 70 persen mereka mengatakan tidak memiliki. *“Itu mungkin lebih lengkap di desa mbak, saya tidak punya,”* demikian jawaban yang sama dari para ketua RT di Desa Sudimoro.

Padahal posisi pemerintah desa bila dikaji dari hubungan sosial pada masyarakat, secara emosional jauh dari warga terbawah. Yang terdekat dan lebih paham dengan kondisi warganya adalah ketua RT, namun hampir 70 persen Ketua RT lebih menggantungkan pada perangkat desa. Bahkan, salinan kartu keluarga untuk masing-masing RT, Supadi pun tidak memiliki. Data andalannya adalah lima lembar kertas berisi daftar calon pemilih tetap itu. Desa Sudimoro memiliki 16 RT dengan masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dari 16 RT ini, berdasarkan wawancara masing-masing ketua RT dan observasi, hanya ada 2 RT yang memiliki salinan KK warga, yaitu RT 15 dan 16. Sementara RT yang memiliki salinan daftar pemilih tetap ada 11 RT, sisanya 3 (tiga) RT yang tidak memiliki salinan KK maupun salinan daftar pemilih tetap. RT yang tidak memiliki salinan KK dan daftar pemilih tetap biasanya menggunakan catatan pribadi di sebuah buku besar untuk mencatat nama-nama KK di wilayah RT-nya. Seperti Sumarno (55 tahun), Ketua RT 1. Bila membutuhkan data nama-nama kepala keluarga di RT 1, ia kemudian membuka catatannya itu. Lebih dari 5 tahun buku itu setia bersamanya. Jika ada penduduk baru, maka lelaki yang

bekerja sebagai petani ini, menambahkan tulisan baru diisi dengan nama KK pendatang baru tersebut¹²¹.

Demikianlah kondisi yang terjadi di Sudimoro, perangkat desa yang lebih tinggi menggantungkan pada para ketua RT karena posisinya lebih dekat dengan warga wilayah RT-nya, sedangkan ketua RT pun bergantung pada perangkat desa sebagai “pemilik” desa. Adanya saling tunjuk ini malah tidak menyelesaikan permasalahan. Pada umumnya, baik pemerintah desa maupun ketua RT membiarkan masalah ini karena tidak ada kebutuhan urgen dalam waktu dekat. Namun bila dibutuhkan baru kemudian *kalang kabut*¹²².

Belum tertatanya sistem database sosial-spasial di tingkat pemerintah desa ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan keterampilan aparat desa dalam mengelola data yang ada. Hal ini diakui sendiri oleh Sekretaris Desa Sudimoro, Muhadjir (40 tahun). Ia sangat menyayangkan karena sebageian besar aparat desa belum bisa melayani kebutuhan masyarakat apalagi kemampuan mengoperasikan komputer, terutama aparat yang berusia lebih tua. Dari 9 perangkat Desa Sudimoro yang ada, hanya 4 (empat) orang yang memiliki keterampilan mengoperasikan komputer tingkat dasar, yaitu Kepala Desa (Agus Erwanto), Sekretaris (Muhadjir), Kepala Dusun II (Marwanto), dan Kaur Umum (Sri Wardoyo). Tetapi perangkat yang lebih sering bersentuhan dengan data-data administrasi adalah sekretaris sehingga komputer yang terdapat di Balai Desa

¹²¹ Hasil wawancara dan observasi dengan Sumarno (55 tahun), ketua RT 1 Dukuh Wates, pada 29 November 2013. Pukul 10.00 WIB. Sumarno juga aktif dalam kepanitiaan pemilu dan pilkada.

¹²² Kalang kabut (Bahasa Jawa): bingung dan berusaha mengerjakan dengan cepat

Sudimoro biasa digunakan oleh Sekretaris Desa (Sekdes). Hal ini sebagaimana tugas seorang sekretaris desa yang menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada kepala desa, serta mempunyai fungsi sebagai berikut; 1) melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan, 2) melaksanakan urusan keuangan, 3) melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dan 4) melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa apabila kepala desa berhalangan melakukan tugasnya¹²³.

Kurangnya keterampilan perangkat lain selain Sekdes untuk melayani masyarakat yang membutuhkan dokumen atau lainnya berpengaruh terhadap jalannya proses pelayanan kepada masyarakat. Misalnya, masyarakat yang ingin membuat KTP saja harus menunggu Sekdes. Terkadang Sekdes pun tidak hadir di kantor desa di saat jam kerja disebabkan ada urusan lainnya, misalnya menghadiri pertemuan di kantor kecamatan atau mewakili kepala desa pada acara tertentu sehingga Sekdes absen dari kegiatan kantor desa selama sehari. Perangkat lainnya belum mampu melayani, yang terjadi kebutuhan masyarakat tertunda. Muhadjir, selaku Sekdes Sudimoro mengatakan,

“Terkadang sewaktu saya berhalangan hadir ke balai desa, ada warga yang datang ke sini, jadinya tidak mendapatkan pelayanan karena perangkat lain tidak bisa melayani karena tidak paham. Padahal sudah saya sediakan blanko isian yang kosong, tinggal mengisi saja. Biasanya

¹²³ Rahardjo Adisasmita, *Membangun Desa Partisipatif...*, hal. 125

*pak Marwanto, kadus itu saya serahi untuk melayani warga, karena yang lain tidak bisa.*¹²⁴

Hal ini diamini oleh Sri Wardoyo (Kaur Pembangunan) dan Jumeno (Kaur Pemerintahan). *“Ya mau bagaimana lagi. Apalagi kemampuan komputer, perangkat yang muda yang bisa, perangkat yang usianya lebih tua, tidak bisa mengoperasikan komputer.”* Demikianlah kelebihan dan kekurangan yang ada pada pemerintah desa dan masyarakat Sudimoro. Hal ini menimbulkan adanya rasa ketidakpuasan di satu pihak dengan yang lain. Namun tidak sampai pada perpecahan yang ekstrim.

b. Penggunaan Data Lama (*Out of Date*) yang Tidak Valid

Pemerintah desa masih menggunakan data lama beberapa tahun yang lalu yaitu data mengenai penduduk miskin pada tahun 2009. Padahal kondisi ekonomi warga mengalami turun naik, ada yang saat ini kurang mampu, di kemudian hari telah mampu sehingga bukan termasuk warga miskin lagi dan sebaliknya. Data lama inilah yang digunakan oleh pemerintah pusat (sumber data berasal dari BPS) untuk menggelontorkan bantuan. *“Setiap akan ada bantuan semisal BLT itu kami meminta pada pihak ketua RT untuk mendata warganya yang miskin, data itulah yang kami serahkan ke atas (pemerintah kecamatan, red), tapi ketika bantuan sudah turun kok tetap saja daftar nama warga yang*

¹²⁴ Hasil diskusi dengan Muhadjir, Sekretaris Desa Sudimoro, Sri Wardoyo, dan Jumeno, pada 11 November 2013.

lama yang diberi. Saya juga heran”, jelas Sekdes.¹²⁵ Sementara para ketua RT saat diminta menjelaskan bagaimana proses penyaluran data penerima bantuan pemerintah menyebutkan bahwa ketua RT menulis nama-nama warga yang kurang mampu lalu disetorkan ke pemerintah desa, pemerintah desa inilah yang kemudian mengajukan ke pemerintah yang lebih tinggi yaitu pemerintah kecamatan. *“Tetapi sama saja, sejak dulu sampai sekarang yang dapat sama. Malah warga yang kaya mendapat bantuan. Saya sebagai ketua RT ya kalau ada bantuan, ditugasi pemerintah desa membagikan ya saya lakukan sesuai nama di daftar penerima”*, ungkap Dalari. Hal ini pula dilakukan oleh seluruh Ketua RT di Desa Sudimoro.¹²⁶

Kepala desa, sekretaris desa, kaur dan kadus serta beberapa masyarakat menyadari bahwa pemerintah desa sangat membutuhkan data-data sebagai informasi terkait penduduk. Namun selama ini data-data tersebut belum tersedia atau lebih tepatnya pihak pemerintah desa belum memiliki. Data yang dimiliki pemerintah desa seperti profil desa atau buku monografi yang tertulis tahun 2012, terdapat beberapa kerancuan. Contohnya mengenai jumlah RT, di buku data monografi Desa Sudimoro tertulis bahwa terdapat 24 RT. Kemudian berbekal data ini, penulis berusaha membuktikan di lapangan, ternyata jumlah RT hanya ada 16 RT. Selain itu mengenai jumlah penduduk, berdasarkan data tahun 2012

¹²⁵ Hasil diskusi dengan Muhadjir, Sekretaris Desa Sudimoro, Sri Wardoyo, dan Jumeno, pada 11 November 2013.

¹²⁶ Diolah dari hasil wawancara dengan Dalari (60 tahun), ketua RT 2 pada tanggal 29 November 2013. Mengenai proses penyaluran dana bantun pemerintah ini disebutkan pula oleh 15 orang ketua RT di Desa Sudimoro.

dari BPS Klaten pada buku Kecamatan Tulung Dalam Angka 2012, tertulis jumlah penduduk Desa Sudimoro ada 3.316 jiwa, sementara di buku monografi desa terdapat 3.312 jiwa.

Sehubungan dengan kepemilikan data penduduk masing-masing RT di Desa Sudimoro, ketua RT memiliki data penduduk berupa data daftar pemilih tetap untuk pemilu atau pilkada. Terkait dengan data ini terdapat kerancuan yang terjadi selama bertahun-tahun masih digunakan. Kerancuan data tersebut terletak pada penyantunan nama-nama penduduk yang lama merantau, pindah ke luar Klaten dan meninggal dunia. Kerancuan tersebut juga dapat dilihat melalui nama pemilik rumah yang tinggal di Desa Sudimoro yang telah lama meninggalkan rumahnya selama bertahun-tahun sehingga rumah yang bersangkutan menjadi kosong. Bahkan sampai rusak. Berikut ini data rumah kosong yang terdapat di Desa Sudimoro per tahun 2013,

Tabel 5.1
Data Rumah Kosong Desa Sudimoro

No.	RT	Jumlah Rumah Kosong	Kondisi Rumah	Keberadaan Pemilik Saat Ini	Pemanfaatan Rumah Kosong Saat Ini
1.	1	6	Baik	- 3 KK pindah ke Bandung - 3 KK meninggal dunia	Tetap kosong
2.	2	2	Baik	- 1 KK pindah ke Prambanan - 1 KK meninggal dunia	Tetap kosong
3.	3	3	2 baik, 1 agak rusak	- 1 KK pindah ke Jakarta - 2 KK meninggal dunia	Tetap kosong
4.	4	6	5 rumah baik, 1 rumah atap dan dinding rusak	6 KK meninggal dunia	Tetap kosong
5.	5	4	3 rumah baik, 1 rumah	- 1 KK pindah ke	Kandang sapi (1

			rusak	Kalimantan - 2 KK meninggal dunia	rumah)
6.	6	5	Baik	5 KK meninggal dunia	Tetap kosong
7.	7	5	Baik	- 2 KK pindah ke Jakarta - 2 KK meninggal dunia	Tetap kosong
8.	8	5	Baik	- 1 KK pindah ke Dukuh Maduan - 4 KK meninggal dunia	Digunakan TPQ (1 rumah)
9.	9	6	Baik	- 2 KK pindah ke Bandung - 4 KK meninggal dunia	Tetap kosong
10.	10	7	6 rumah baik, 2 rumah atap dan dinding rusak	- 1 KK pindah ke Sumatera - 1 KK pindah ke Dukuh Sudimoro - 2 KK pindah ke Desa Daleman - 3 KK meninggal dunia	Tetap kosong
11.	11	8	Baik	- 3 KK pindah ke Bandung - 3 KK pindah ke Jakarta - 2 KK meninggal dunia	Ditempati pendatang baru dari luar desa (2 rumah)
12.	12	7	Baik	- 3 KK pindah ke Jakarta - 4 KK meninggal dunia	Tetap kosong
13.	13	4	Baik	- 1 KK pindah ke Jakarta - 3 KK meninggal dunia	Tetap kosong
14.	14	4	Baik	- 2 KK pindah ke Jakarta - 2 KK meninggal dunia	Tetap kosong
15.	15	2	Baik	- 2 KK meninggal dunia	Tetap kosong
16.	16	9	7 rumah baik, 2 rumah atap dan dinding rusak	- 5 KK pindah ke Jakarta - 4 KK meninggal dunia	Tetap kosong

Sumber: Pendataan dilakukan peneliti bersama tim lokal pemetaan sosial-spasial pada 2-3 Juli 2013, 29 November - 14 Desember 2013.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat rumah kosong sebanyak 83 rumah. Tercatat berdasarkan pendataan tahun 2013, terdapat 8 KK pindah ke Bandung, 17 KK pindah ke Jakarta, satu KK pindah ke Sumatera, satu KK pindah ke Kalimantan, satu KK pindah ke Prambanan (Kabupaten Klaten), dan dua KK pindah ke Desa Daleman (Kecamatan Tulung). Selain itu, penduduk juga melakukan pindah rumah di dukuh lain di Desa Sudimoro, terdapat 1 (satu) KK dari Dukuh Maduan pindah ke Dukuh Pencil, 1 (satu) KK dari Dukuh Jaten pindah ke Dukuh Maduan, 2 (dua) KK dari Dukuh Pencil pindah ke Desa Daleman (Kec. Tulung), juga terdapat 2 (dua) KK yang belum tercantum sebagai penduduk Desa Sudimoro.¹²⁷ Dari dua KK tersebut, satu KK tidak tercantum atau belum memiliki KK Desa Sudimoro karena belum melaporkan kedatangannya kepada Ketua RT atau RW setempat, padahal warga tersebut telah tinggal selama hampir dua tahun. Sementara satu KK yang lain masih tercatat sebagai penduduk luar desa tetapi menetap di Desa Sudimoro.

Terbukti penggunaan data lama (*out of date*) yang tidak valid ini digunakan pada pemilihan umum atau pilkada. Seperti di RT 9, ketua RT 9, Aris Purwanto memiliki data daftar pemilih pada pemilu atau pilkada, ketua RT mendapatkan data tersebut tentu berasal dari pemerintah desa. Namun disayangkan, ada beberapa nama yang masih tercantum dalam daftar pemilih padahal pemilik nama tersebut tidak menetap lagi di Desa Sudimoro, bahkan

¹²⁷ Pendataan dilakukan tim lokal pemetaan sosial-spasial Desa Sudimoro dan penulis pada 2-3 Juli 2013 dan 29 November- 14 Desember 2013.

bertahun-tahun. Haryono, misalnya. Nama Haryono masih tercantum dalam daftar tersebut padahal, lelaki ini sejak 15 tahun yang lalu telah pindah dan menetap di Jakarta. Selain Haryono, terdapat nama Sayem, kerancuan terlihat di mana terdapat dua nama Sayem. Padahal di RT 9, Dukuh Mlandangan, hanya ada satu nama Sayem, dan ia telah meninggal dunia. Setelah dicek, dua nama Sayem tersebut hanya berbeda tanggal lahirnya saja.¹²⁸

Biasanya pemerintah desa mengandalkan pada pemerintah di atasnya yaitu pemerintah kecamatan dan atau pemerintah kabupaten. Kenapa pemerintah desa bergantung dari pemerintah di atasnya? Dikarenakan, ada semacam anggapan bahwa data lengkap yang bisa dikatakan valid tentang kondisi masyarakat dimiliki oleh pemerintah pusat melalui sensus penduduk setiap 10 tahun sekali. Data tersebut terekap dalam arsip atau dokumentasi BPS. Informasi atau data penting menyangkut penduduk inilah yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah desa dan masyarakat. Namun selama ini pandangan bahwa data merupakan sesuatu yang belum dianggap penting oleh masyarakat kebanyakan tidak hanya di Desa Sudimoro saja. Di desa lain pun mungkin terjadi pula, seperti di Desa Sorogaten (Kec. Tulung), terletak di sebelah tenggara Desa Sudimoro. Oleh sebab itu, perlu ada pengorganisasian untuk penyadaran dan pemahaman kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi melalui proses inisiasi demi pembangunan yang menyejahterakan.

¹²⁸ Hasil wawancara dengan Aris Purwanto (38 tahun), ketua RT 9, Dukuh Mlandangan, Desa Sudimoro, pada 27 desember 2013, pukul 15.30 WIB

Setelah dilakukan proses FGD bersama perangkat desa dan karang taruna serta masyarakat di samping pendekatan personal pula, tentang upaya menyelesaikan permasalahan tadi, ternyata muncul sebuah harapan dan binar dimata mereka. Bahwa dengan pendataan atau pemetaan sosial-spasial bersama masyarakat akan membuat aparat desa mampu melihat kondisi warga yang sebenarnya terutama data persebaran warga miskin dengan informasi lengkap mengenai anggota keluarga, belanja rumah tangga, kondisi rumah, kesehatan, sumber pendapatan, dan jumlah persebaran kepemilikan ternak di Desa Sudimoro, sehingga bila ada penyaluran bantuan apapun yang berasal dari pemerintah pusat atau lembaga lainnya diberikan kepada warga yang kurang mampu atau yang lebih membutuhkan. Bukan diberikan pada keluarga yang mampu secara ekonomi, yang dipandang telah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Belum Efektifnya Jaringan Data Antarlembaga (Pemerintah Desa, Kecamatan, dan Badan Pusat Statistik)

Komunikasi menjadi hal yang penting bagi terselenggaranya pemerintah yang baik. Pemerintah desa sebagai pemerintah terendah dalam struktur pemerintahan dalam negeri ini, memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kebijakan pemerintah di atasnya dan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan pemerintah di atasnya. Belum efektifnya jaringan antar lembaga (pemerintah desa, kecamatan, dan BPS) dalam menyediakan data sosial-spasial disebabkan

oleh tidak ada jalinan komunikasi antara pemerintah desa Sudimoro, kecamatan dan BPS, selaku instansi pemerintah yang menyusun dan menyediakan data. Selama ini pemerintah desa memang sering berhubungan dengan pemerintah kecamatan Tulung. Kepala Desa Sudimoro terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh kecamatan, seperti mengikuti rapat di kecamatan, atau undangan dari Pemda Klaten. Dalam kesempatan ini posisi kepala desa adalah sebagai aparat pemerintah di bawah pemerintah kecamatan, adanya keluhan dari masyarakat desa Sudimoro terkait dana bantuan baik raskin atau BLT, yang sekarang bernama BLSM, telah disadari oleh Pemerintah Desa Sudimoro. Namun, belum ada koordinasi dengan pihak pemerintah kecamatan terkait permasalahan bantuan-bantuan yang diterima seperti BLT atau BLSM, di mana di beberapa daerah pedesaan di Indonesia sampai terjadi protes dan demo. Bahkan penghilangan nyawa karena dendam terhadap aparat pemerintah. Walaupun ada pendataan calon penerima bantuan lewat ketua RT, itu sama saja, tidak ada tindak lanjut dan perubahan. Data masih menggunakan data yang sama dengan dulu.

Penyebab lainnya adalah menyangkut persepsi negara dan aparaturnya terhadap kedudukan rakyat pedesaan dalam proses pembangunan. Sampai saat ini rakyat pedesaan, oleh negara dan aparaturnya, dianggap hanya sebagai sumber energi, bukan sebagai sumber informasi. Secara normatif, perencanaan *bottom-up* telah ditetapkan sebagai model proses perencanaan yang berlaku namun dalam pelaksanaannya masih banyak ditemui model perencanaan yang

mekanistik. Misalnya kegiatan sarasehan di tingkat Kecamatan Tulung yang diikuti oleh para kepala desa yang dibawahinya, komunikasi untuk membahas permasalahan data belum mencapai titik maksimal sampai direalisasikan sehingga walaupun desa memiliki data mengenai penerima BLT hanya sebagai dokumen yang dimiliki bukan sebagai dokumen yang digunakan.

Seperti yang diakui oleh kepala desa, sekdes, kaur umum, kaur pemerintahan, dan seluruh ketua RT di Sudimoro, bahwa ada ketidaksinkronan antara data yang diajukan oleh pemerintah desa dengan data yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Data yang dimiliki oleh pemerintah pusat adalah data penerima pada 10 tahun lalu, padahal para penerima bantuan tersebut mengalami tingkat kesejahteraan yang dapat turun atau naik. Harapan dari seluruh elemen masyarakat Desa Sudimoro bahwa ada pembaharuan data sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya.

Dalam berbagai kasus, karena tidak adanya komunikasi atau karena masih adanya “arogansi” antar masing-masing instansi penyedia data sosial-spasial, sering terjadi set data dasar yang sama untuk berbagai daerah yang itu-itu saja diadakan atau dipetakan berkali-kali. Dampaknya dirasakan oleh masyarakat terkait seperti kasus BLT atau BLSM. Dalam hal ini. Badan Pusat Statistik (BPS) dijadikan kambing hitam atas penggunaan data Bantuan Langsung Sementara Masyarakat yang tidak mutakhir. Salah satu dari penyebab tidak sampainya bantuan yang tepat sasaran adalah data yang tidak valid. Menurut Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K),

penggunaan data dari Badan Pusat Statistik yang bertahun 2011 disebabkan karena pemutakhiran dan survei membutuhkan waktu dan biaya mahal. Selain itu pula, penggunaan data yang tidak valid membuat BLSM seperti kelanjutan dari BLT¹²⁹.

Keadaan dan situasi seperti ini tentu saja tidak dapat dibiarkan terus menerus demikian, dan selalu dibiarkan berulang-ulang terjadi. Itulah dampak dari pembangunan berbasis *economic growth* yang tak dapat dipungkiri menggejala pada sistem pemerintahan desa dan masyarakat sehingga masyarakat dan pemerintah desa menganggap data hanyalah sebuah formalitas dalam administrasi pemerintahan baik itu pemerintahan desa maupun kecamatan, bukan sebuah bahan penting untuk merumuskan sebuah keputusan dan kebijakan untuk program pembangunan. Sehingga untuk mendapatkan informasi, pemerintah desa hanya mengambil sampel saja yang ternyata kurang mewakili kondisi masyarakat sebenarnya, terutama data mengenai masyarakat miskin.

B. Dampak Lemahnya Database Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi dan Kemasyarakatan Bagi Warga Sudimoro

Konsep yang dipahami pemerintah adalah masyarakat harus secara mutlak mendukung dan menerima program-program pemerintah yang dirancang dan ditentukan oleh pemerintah. Pendekatan pembangunan yang dilakukan

¹²⁹ “*Bantuan Langsung Sementara Masyarakat*”, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan_Langsung_Sementara_Masyarakat, diakses pada 21 Desember 2013. BLSM yang kisruh menyisakan duka pada masyarakat, pernah ditayangkan MetroTV tanggal 20 Juni 2013 dan 5 Juli 2013

pemerintah saat ini, walaupun secara normatif, menggunakan pendekatan *bottom-up*. Tetap saja secara pelaksanaan menggunakan pendekatan mekanistik. Sehingga *trickle down effect* (tetesan ke bawah) berupa remah-remah pembangunan dalam bentuk bantuan-bantuan di mana pemerintah bertujuan untuk menyejahterakan rakyat lewat program-program yang dibuat, yang diganti nama, setiap ganti kepemimpinan. Program pembangunan dalam bentuk bantuan-bantuan, yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dalam kenyataannya tidak dirasakan dengan adil oleh masyarakat. Bahkan menimbulkan kesenjangan antara pemerintah dengan rakyat, dan masyarakat dengan masyarakat lainnya (dalam satu komunitas).

Permasalahan yang muncul di Indonesia tentang program pembangunan pemerintah yang diwujudkan seperti bantuan beras miskin, Bantuan langsung Tunai (sekarang bernama BLSM), dan jamkesmas, terjadi di beberapa wilayah di Indonesi termasuk Sudimoro. Penyebab yang menimbulkan penyaluran bantuan tersebut tidak tepat sasaran adalah kurangnya pengelolaan sistem data base karena pemahaman dan keterampilan aparat yang masih rendah. Sehingga pada beberapa kesempatan, penyebab inilah yang menjadi penyebab utama penyaluran dana bantuan salah sasaran.

Permasalahan yang terjadi di Desa Sudimoro ini pun tak ayal menimbulkan beberapa dampak, antara lain:

1. Program Tidak Tepat Sasaran

Adanya kericuhan di desa lain terkait penyaluran dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) telah dirasakan masyarakat Desa Sudimoro. Pasalnya dana bantuan yang sering disebut balsem, yang merupakan kelanjutan dari BLT ini hanya biasa diterima oleh rumah tangga sasaran. Padahal kenyataannya rumah tangga sasaran tersebut tidak kesemuanya miskin. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sauji (60 tahun), ketua RT 8 Dukuh Jaten, *di Sudimoro itu orang kaya malah dapat bantuan, ada yang miskin tidak mendapat bantuan.*” Ia memahami posisinya yang sebagai Ketua RT inilah yang mendapat komplain pertama dari warga, bukan pemerintah desa atau kepala desa yang mendapat protes, pun warga tidak akan berani. Jadi rawan bila tidak disalurkan secara tepat. *“Kalau ada bantuan, semua saya bagikan rata pada warga, kecuali warga yang kaya,”* tambahnya.

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat atau BLSM adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Indonesia menyambut kenaikan harga BBM yang terjadi pada 22 Juni 2013. Sebagai akibat dari kenaikan harga BBM, maka pemerintah mengadakan dua bantuan untuk rakyat Indonesia, yaitu Bantuan Langsung Sementara Masyarakat dan Bantuan Siswa Miskin. Pemerintah Indonesia meyakini tindakan ini adalah penting untuk menyelamatkan fiskal negara, meskipun pemerintah juga meyakini bahwa ini adalah keputusan yang

sulit bagi pemerintah.¹³⁰ Pada tahun ini (2013), BLSM terdiri dari dua tahap, yaitu tahap I dan tahap II. BLSM tahap I (Juni-Juli) cair pada Juli 2013, sementara tahap II (September-Oktober) cair pada September 2013, dengan jumlah besaran Rp 300.000,- per rumah tangga sasaran. Pemerintah mengalokasikan anggaran BLSM tahap dua sebesar Rp 4,7 triliun untuk diberikan kepada 15.530.897 rumah tangga sasaran (RTS) di seluruh Indonesia¹³¹.

Tercatat menurut data yang dimiliki Pemerintah Desa Sudimoro terdapat 240 KK¹³² yang mendapat bantuan raskin dan BLSM dari 883 KK di Sudimoro. Data yang digunakan sebagai acuan penyaluran dana bantuan maupun bantuan raskin adalah data tahun sebelum tahun 2013, yaitu tahun 2008. Dalam hal ini, Badan Pusat Statistik (BPS) dijadikan pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan data Bantuan Langsung Sementara Masyarakat yang tidak mutakhir. Salah satu dari penyebab tidak sampainya bantuan yang tepat sasaran adalah data yang tidak valid. Padahal diakui oleh perangkat desa, ketua RT, dan masyarakat paling bawah bahwa kehidupan warga, tetangganya ada yang mengalami kemajuan dan kemunduran pada tingkat ekonomi.

Belum tertatanya sistem database desa ini mengakibatkan penyelesaian permasalahan di desa kurang fokus. Dalari, mengungkapkan bahwa dana bantuan

¹³⁰ Wikipedia, “*Bantuan Langsung Sementara Masyarakat*,” dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan_Langsung_Sementara_Masyarakat, diakses pada 21 Desember 2013

¹³¹ Angga Bhagya Nugraha, “*Ada Warga Cirebon Terima BLSM Rp 600 Ribu*,” dalam Warta Kota online, diakses pada 16 Januari 2014

¹³² Data penerima BLSM yang masuk daftar kuota BPS dan pemerintah untuk Desa Sudimoro

BLSM yang diterima pemerintah Desa Sudimoro disalurkan kepada masyarakat penerima melalui masing-masing Ketua RT yang berjumlah 16 RT. Bantuan BLSM yang diterima sebesar RP 300.000,- per KK. Pemerintah Desa Sudimoro beserta perangkatnya pun mengalami kekhawatiran dalam menyalurkan dana bantuan. Mereka takut bila BLSM tidak di dibagikan secara tepat pada penduduk yang benar-benar miskin, pihak Pemerintah Desa Sudimoro lah yang mendapat getahnya karena institusi inilah yang paling tinggi dan dekat dengan penduduk di wilayah pedesaan. Terjadinya protes dan demo di beberapa daerah, yang diketahui dari berita di televisi dan kasus di desa tetangga di Kecamatan Tulung sampai menelan korban jiwa menjadi salah satu sebab kekhawatiran mereka. Selain khawatir, pemerintah desa tidak berani bila membagi dana bantuan sesuai nama atau kuota dari BPS. Jika ini dilakukan akan terjadi saling iri di antara warga penerima dan non penerima.

Tabel 5.2
Daftar RTS Penerima BLT/BLSM Dusun I

RT	Nama KK Rumah Tangga Sasaran	RT	Nama KK Rumah Tangga Sasaran
RT 12	Bakri	RT 14	Mulyadi
	Marwanto		Widoyo
	Marani		Suripto
	Khumaedi		Suratman
	Malawi		Suparlan
	Sunyoto		Eksan
	Purjoko Jono Pawiro		Maryono
RT 13	Yamto	RT 15	Samsuri
	Mustajab		Suhadi
	Karsi		Sarjo
	Priyono		Bakir
	Sakim		Pareng

	Marto Semi	RT 16	Wagito
	Painem		Kromo surip
RT 14	Suparman		Suherman
	Rejo bejo		Giato
	Yatmiatun		Jumlah

Sumber: Hasil diskusi dengan Sri Wardoyo dan Jumeno, perangkat Desa Sudimoro, pada 27 Desember 2013 pukul 14.00 WIB

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penerima bantuan raskin yang termasuk dalam daftar kuota Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan data dari Kecamatan Tulung di Dusun I Desa Sudimoro terdapat 33 KK. BLSM yang diperoleh satu KK sebesar Rp 300.000,-. Adanya kekhawatiran tersebut dan meminimalisasi kecemburuan sosial yang terjadi membuat pemerintah desa mengambil kebijakan untuk membagikan dana BLSM tersebut kepada seluruh warga di Sudimoro. Kecuali warga yang mampu secara ekonomi dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). BLSM sebesar Rp 300.000,- itu kemudian dibagi untuk KK yang namanya terdaftar sebagai penerima BLSM dan warga yang dipandang miskin oleh pemerintah desa dan ketua RT. Pembagiannya sebesar 50 %: 50 % sehingga jumlah sebesar Rp 300.000,- diberikan pada penerima yang terdaftar sebesar Rp 150.000,- dan Rp 150.000,- kepada warga yang tidak terdaftar.

Warga yang tidak terdaftar ini tentu bukan semuanya warga miskin. Bila dasar acuan untuk memberi dana bantuan tersebut adalah dari kondisi rumah, hal ini tentu belum mewakili. Rumah yang bagus belum tentu kaya, namun rata-rata bangunan rumah penduduk Sudimoro bukan lagi bangunan yang sangat memprihatinkan dan kumuh, tetapi terdiri dari dinding tembok, telah dikeramik

ada yang masih beralaskan tanah.¹³³ Namun, terdapat penduduk yang telah lansia dan hidup sendiri. Serta tidak dibiayai oleh anaknya.¹³⁴ Berikut ini daftar penerima BLT di RT 12,

Tabel 5.3
Penerima BLT atau BLSM di RT 12

No.	Nama KK	Ket.	No.	Nama KK	Ket.
1.	Sunyoto	RTS	19.	Purwanto	
2.	Bu Cipto Hadi Mulyo		20.	Khumaedi	RTS
3.	Joko Budiono		21.	Tuginin	
4.	Sunarto		22.	Tuminem	
5.	Slamet Widodo		23.	Tukiman	
6.	Marjono		24.	Ngatijo	
7.	Marani	RTS	25.	Bu Supartini	
8.	Atmo		26.	Purjoko	
9.	Waliyem	Janda tua	27.	Joko Purwanto	
10.	Madi Suparto		28.	Marwanto	RTS
11.	Bu Sri Murah		29.	Pardi	
12.	Bakri	RTS	30.	Parinem	
13.	Dame Sri Widodo		31.	Wandi	
14.	Mbah Joyo		32.	Purjoko Jono Pawiro	RTS
15.	Jumadi		33.	Sri Pinuwun	
16.	Warto Suwito				
17.	Suroso				
18.	Malawi	RTS	Jumlah : 33 KK		

Sumber: Hasil wawancara dan pemetaan dengan Supadi (65 tahun), Ketua RT 12, Dukuh Gumuk Roto, pada 03 Juli 2013

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah penerima BLT atau BLSM di RT 12 terdapat 33 KK. Jumlah KK di Dukuh Gumuk Roto terdapat 41 KK, berarti ada 8 KK yang tidak mendapatkan BLSM yang merupakan warga kaya. Sementara terdapat persoalan mengenai penyaluran bantuan tersebut yaitu tidak tepat sasaran dan kurang menyelesaikan persoalan. Terbukti, seorang janda tua

¹³³ Hasil diskusi dengan Muhadjir, Syaemuri, Marwanto, pada 17 Desember 2013 pukul 11.00 WIB

¹³⁴ Hasil diskusi dengan Lilis dan Purwaningsih, pada 14 Desember 2013 pukul 14.15 WIB

bernama Waliyem (85 tahun), tidak mendapatkan BLT/BLSM sebagai RTS dari pemerintah. Ia hanya mendapatkan setengah dari jumlah bantuan yaitu sebesar Rp 150.000,-. Ia hidup di perkampungan Gumuk Roto, beruntung keluarganya masih perhatian sehingga ada cucunya yang merawat. Setiap dua bulan sekali penerima bantuan yang termasuk RTS mendapat uang sebesar Rp 300.000,- (mendapat Rp 150.000,- karena dibagi Rp 150.000,- dengan penerima non RTS). Berikut ini contoh daftar konsumsi rumah tangga miskin per kepala keluarga dalam satu bulan, yaitu keluarga Salimin. Salimin merupakan warga Dukuh Malang Sari, ia bekerja sebagai seorang buruh tani. Keluarganya mendapatkan BLSM dan raskin dari pemerintah Desa Sudimoro, namun dirinya bukan penerima dalam daftar rumah tangga sasaran dari pemerintah pusat.

Tabel 5.4
Belanja Bulanan Keluarga Buruh Tani:
Keluarga Salimin
Dukuh Malangsari Dusun III Desa Sudimoro

BELANJA (rata-rata per-bulan)		A Banyaknya	B Harga (@Rp)	C (AxB) Jumlah (Rp)
BELANJA PANGAN				
1	Beras/sagu/umbi-umbian, dll	30 hari	8.500	255.000
2	Lauk-pauk (ikan, daging, telur, dll)	30 hari	5.000	150.000
3	Aneka sayuran	30 hari	2.000	60.000
4	Bumbu-bumbu masak	30 hari	3.000	90.000
5	Minyak goreng	-	-	20.000
6	Gula + kopi	-	-	-
7	Rokok	-	-	-
8	Air bersih/rekening PAM	-	-	-
				575.000
BELANJA ENERGI				
9	Gas/kayu bakar	15 hari	16.000	32.000
10	Listrik	1bulan	17.000	17.000
11	BBM sepeda motor	4 liter	7.000	28.000
				77.000
BELANJA PENDIDIKAN				
12	SPP/iuran sekolah anak	-	-	-
13	Jajan harian sekolah anak	30 hari x 3 orang	2.000	180.000
14	Perlengkapan sekolah anak (buku tulis,dll)	1 tahun x 2 orang		200.000
				380.000
BELANJA KESEHATAN				
15	Periksa ke PUSKESMAS	1 bulan	3.500	3.500
16	Beli obat-obatan	-	-	-
17	Perlengkapan kebersihan (sabun, odol, dll)	1 bulan	45.000	45.000
				48.500
BELANJA SOSIAL & LAINNYA				
18	Iuran warga	30 hari	500	15.000
19	Pulsa HP	-	-	-
20	Hiburan (nonton, piknik, dll)	-	-	-
				15.000
TOTAL BELANJA				1.095.500

Tabel di atas adalah belanja bulanan keluarga Salimin (37 tahun). Contoh belanja ini adalah contoh keluarga yang berpendapatan rendah di Desa Sudimoro. Di rumah yang sederhana dia tinggal bersama istrinya, Ngadinah (34 tahun), dan anaknya bernama Yulianti (16 tahun), Inova Ariyanto (10 tahun), Vebriana (7 tahun), Septi Adittyta (4 tahun), dan Dewi Novitasari (6 bulan). Salimin adalah seorang lelaki yang giat bekerja. Pekerjaan utamanya sehari-hari sebagai buruh tani. Penghasilan keluarganya semata diperoleh dari pekerjaannya itu. Selain bertani, ia bekerja sebagai buruh tani, tidak ada pekerjaan lain yang dilakoni kepala keluarga ini. Penghasilan lelaki yang menderita magh ini sebesar Rp 30.000,- per hari bila ada pekerjaan menjadi buruh, terutama jika waktu masa tanam atau masa panen. Pengeluaran rumah tangga ditopangnya sendiri, sementara anggota keluarganya cukup banyak, yakni sebanyak 7 orang. Kelima anaknya masih kecil, kedua anaknya duduk di bangku SD. Mereka bersekolah di SDN 01 Sudimoro. Salimin bersyukur karena biaya sekolah digratiskan sehingga ia hanya menanggung untuk biaya beli buku dan jajan anak-anaknya setiap hari.

Keluarga Salimin tidak memiliki lahan sawah. Ia tidak memiliki cukup biaya untuk maroh lahan sawah apalagi menyewa lahan. Pengeluaran untuk membeli beras setiap hari menghabiskan Rp 8.500,-. Untuk kebutuhan pangan yang lain, setiap hari membeli sayur Rp 2.000,- jadi dalam 1 bulan menghabiskan Rp 60.000,-, untuk lauknya terkadang membeli ikan asin (*klotok*), tahu, tempe atau telur Rp 5.000,- jadi dalam 1 bulan menjadi Rp 150.000,-. Untuk bumbu masak per hari Rp 3.000,- sehingga Rp 90.000/bulan, minyak goreng Rp

20.000/bulan. Sementara pengeluaran untuk membeli gula atau kopi tidak ada, keluarga ini tidak hobi minum kopi. Biasanya mereka lebih menyukai minum air putih. Beruntung Ngadinah memiliki suami yang tidak merokok sehingga uang dapat digunakan untuk kebutuhan lain. Sedangkan pengeluaran untuk air bersih tidak ada karena di Desa Sudimoro rata-rata warganya menggunakan sumur galian untuk mandi, minum, dan masak. Jumlah keseluruhan untuk belanja pangan adalah Rp 575.000,-.

Ngadinah yang tidak bekerja ini memasak menggunakan kayu bakar dan gas LPG sehingga lumayan hemat. Untuk anggaran membeli gas LPG dalam sebulan hanya menghabiskan dua tabung LPG ukuran 3 kg seharga Rp 16.000 jadi sebulan Rp 32.000,-. Dapat dikatakan hemat karena jumlah keluarganya cukup banyak yaitu 7 orang. Biasanya di Sudimoro 4 anggota keluarga saja dalam satu bulan menghabiskan 2 tabung LPG. Kayu bakar yang digunakan biasanya dia cari sendiri di pekarangan. Dengan adanya kayu bakar, ibu rumah tangga ini tidak bergantung pada LPG sehingga pengeluaran memasak dapat diminimalisasi. Pengeluaran untuk membayar listrik sebanyak Rp. 17.000,-/bulan, di rumahnya ada beberapa lampu yaitu di ruang tamu, ruang tengah, dan beberapa kamar tidur dan di dapur serta sebuah televisi ukuran 14 inch. Salimin memiliki satu motor yang digunakan untuk bepergian ke desa sebelah, ke pasar atau lainnya. Untuk mengisi bahan bakarnya, lelaki ini membeli dipengecer seharga Rp 7.000,-. Dalam sebulan menghabiskan 4 liter bensin pengeluaran untuk bensin Rp 28.000,-. Ia jarang bepergian menggunakan motor. Dalam satu

minggu hanya habis satu liter. Jumlah keseluruhan untuk belanja energi per bulan adalah Rp 77.000,-.

Belanja untuk pendidikan kelima anaknya, Yulianti, Inova, Vebriana, Septi, dan Dewi tidak memakan biaya yang mahal. Anaknya yang sekolah hanya dua orang yaitu Inova (10 tahun) dan Vebriana (7 tahun), keduanya masih duduk di bangku kelas 4 dan 3 di SDN 01 Sudimoro. Sementara Yulianti seharusnya sekarang bersekolah di SMA. Tetapi Salimin dan Ngadinah tidak mampu membiayai, di samping itu adik-adiknya masih kecil sehingga Yulianti terpaksa tidak bersekolah sejak tamat SD. Sekarang gadis usia 16 tahun ini bekerja membantu kedua orang tuanya, yaitu sebagai pembantu rumah tangga di Jogjakarta sejak tahun 2012 lalu. Setiap bulan Yulianti mendapat gaji sebesar Rp 500.000,-. Kedua adiknya, Inova dan Vebriana terbebas dari biaya SPP karena mendapatkan dana bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hanya biaya dikeluarkan untuk jajan setiap hari yaitu Rp 2.000,- per orang, ditambah adiknya Septi (4 tahun) sehingga dalam sebulan Rp 180.000,-. Biaya perlengkapan sekolahnya yaitu untuk membeli buku tulis, Lembar Kerja Siswa (LKS), dan alat tulis yang lain sejumlah Rp 100.000,-/tahun. Jumlah keseluruhan untuk pengeluaran pendidikan anak adalah Rp 380.000,-.

Sementara itu, biaya untuk membeli obat-obatan Rp 3.500,-/bulan. Untuk perlengkapan kebersihan selama satu bulan sebesar Rp 45.000,-.Jumlah keseluruhan belanja keperluan kesehatan adalah Rp 48.500,-.

Pengeluaran lain yaitu iuran untuk kampung sebesar Rp 500,- per hari. Iuran ini diletakkan di sebuah gantungan dari bekas gelas air mineral dan digantungkan di dinding depan rumah atau di samping pintu sehingga bagi petugas kampung yang mengambil lebih mudah dalam mengumpulkan tanpa mengetuk pintu dahulu jika sewaktu-waktu si empu rumah tidak berada di rumah. Jumlah keseluruhan untuk pengeluaran kebutuhan sosial adalah Rp 15.000,- per bulan. Salimin dan Ngadinah tidak aktif pada kegiatan kampung semisal tahlilan atau arisan ibu-ibu sehingga untuk belanja sosial cukup sedikit. Apabila semua biaya untuk belanja mulai dari belanja pangan, belanja energi, belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja sosial dan lainnya dikalkulasi menjadi **Rp 1.095.500,- per bulan.**

Penjelasan di atas adalah mengenai pengeluaran keluarga Salimin dan Ngadinah. Berdasarkan form survei belanja rumah tangga ini pula dapat diketahui pendapatan dari keluarga petani ini. Keluarga ini bertopang diatas kemampuannya dalam mengolah tanah pertanian orang lain dengan menjadi buruh tani. Berdasarkan survei belanja bulanan di atas dapat diketahui bahwa antara pendapatan dan pengeluaran keluarga Salimin cukup jauh selisihnya. Pendapatan keluarga Salimin dalam sebulan Rp 900.000,-. Sementara pengeluaran dalam sebulan sebesar Rp **1.095.500,-**. Berarti untuk belanja setiap bulan masih kekurangan Rp 195.500. Dia menutupi kekurangan ini dengan meminjam uang di saudaranya atau membeli keperluan di toko dengan berhutang dulu. Jadi, lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Namun jika ditambah

dengan pendapatan Yulianti yang setiap bulan mendapat gaji dari pekerjaannya sebagai pembantu rumah tangga Rp 500.000,- maka kekurangan tersebut dapat tertutupi.

Wiyono menyebutkan warga RT 7 yang dipimpinnya, pun terjadi seperti yang dialami oleh RT lainnya di Desa Sudimoro. Ia menuturkan bahwa selama ini pemerintah Desa Sudimoro dalam membuat keputusan tentang warga yang berhak mendapatkan bantuan masih diliputi kejanggalan. *“Beberapa orang yang cukup mampu ekonominya tetap mendapatkan bantuan. Padahal warga yang tergolong miskin masih cukup banyak.”* Wiyono pernah mengusulkan kepada pemerintah desa agar lebih melihat masyarakat yang kurang mampu. Namun kritik dan sarannya ini tidak mendapatkan respon yang positif. Bahkan ada penerima bantuan yang tidak rela bila nama mereka digantikan oleh warga lain yang miskin. Ketidakterelaan mereka biasanya diungkap lewat curhatan sesama teman dekat. Atau ketika ibu-ibu *ngrumpi*. Sehingga akhirnya diputuskan untuk tetap nama penerima tersebut yang mendapatkan bantuan namun ia harus memberikan secara sukarela sebagian bantuan tersebut kepada warga yang tergolong miskin.¹³⁵ Wiyono mengakui, bahwa dalam penyaluran bantuan dari pemerintah kebijakan pemerintah desa sangat penting dan harus diperhatikan sebelum memutuskan. Lelaki ini mengatakan bahwa dalam penyaluran dana bantuan, sistem kepercayaan kepada orang terdekat dengan aparat pemerintah

¹³⁵ Hasil wawancara dengan Wiyono (50 tahun), warga Desa Sudimoro Dukuh Maduan RT.7, pada 03 Juli 2013.

sangat berpengaruh. Orang tersebut secara emosional dan hubungan kekerabatannya kuat, sehingga orang inilah yang dipercaya.¹³⁶ Sementara menurut Sauji, wilayah RT-nya, RT 8, Dukuh Jaten, mengatakan “*pamong deso niku kathah teng nggene Maduan, dados bantuan nggeh cepet ten mriku,*” (aparap desa banyak yang tinggal di Dukuh Maduan, sehingga banyak bantuan lebih cepat didapatkan di dukuh itu dibanding Dukuh Jaten).¹³⁷

Dalari menyebut penyaluran bantuan yang diberikan salah kaprah. Bagaimana tidak? orang kaya mendapatkan bantuan BLSM sebesar Rp 300.000,. Sedangkan warga miskin tidak mendapat. Ia menyayangkan hal demikian terjadi. Yang ia pertanyakan kenapa bisa terjadi seperti itu, padahal ketua RT pun telah menyerahkan data-data warga miskin pada pemerintah desa. Penulis menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan carik, pemerintah desa pun tidak mengetahui alasan kenapa data-data yang diberikan oleh ketua RT yang kemudian diserahkan pada pemerintah kecamatan dalam pelaksanaannya tidak seperti yang diharapkan. Namun Dalari tidak percaya, “*masa carik tidak tahu?*”.

2. Program Tidak Menyelesaikan Permasalahan

a. Bantuan Beras Miskin (Raskin)

Di samping BLSM, di mana bantuan ini dalam penyalurannya tidak tepat sasaran. Dana tetesan dari pemerintah yang kelihatannya sangat menguntungkan warga namun pada kenyataannya di lapangan yang tidak menyelesaikan

¹³⁶ Hasil wawancara dengan Wiyono, warga Desa Sudimoro....., pada 16 Desember 2013.

¹³⁷ Hasil wawancara dengan Sauji (55 tahun), ketua RT 8, Dukuh Jaten, pada 05 Desember 2013.

permasalahan adalah bantuan beras miskin (raskin). Bantuan raskin yang diterima warga memang disambut antusias, tetapi bantuan tersebut tidak mengindahkan pada aset base yang dimiliki masyarakat lokal. Walaupun sebagai petani gurem, mata pencaharian utama penduduk Sudimoro adalah sebagai petani, varietas padi yang digunakan padi Ciherang, Mentik Wangi, IR 64, Mbrano, Sadane, Thailand, dan sebagian menanam Segreng (beras merah), lainnya. Adapun mata pencaharian penduduk dalam hal pertanian terdapat beberapa macam. Berikut ini klasifikasi petani di Desa Sudimoro;

1) **Petani Pemilik Sawah**

Petani jenis ini memiliki sawah baik tanah berasal dari tanah warisan ataupun dari tanah hasil membeli sendiri. Umumnya luas lahan sawah yang dimiliki petani Desa Sudiomoro berkisar dari 2200 m² sampai 2400 m². Jumlah luas lahan ini biasa disebut 1 (satu) *pathok* oleh masyarakat setempat. Sementara perangkat desa memiliki sawah dari tanah bengkok dan/atau lahan sawah milik sendiri. Dalam mengolah lahannya atau saat masa tanam dimulai, petani pemilik sawah menggarap lahannya sendiri bila mampu beserta keluarga. Bila lahan cukup luas dan tidak ada waktu dan kemampuan untuk mengolahnya, petani ini menyewa jasa para buruh tani di desanya.

Selama satu tahun, petani menanam sebanyak 3 (tiga) kali masa tanam, yaitu dengan urutan padi-padi-jagung. Padi ditanam sewaktu musim hujan sedangkan jagung ditanam saat musim kemarau. Dalam satu tahun, masyarakat Sudimoro yang bekerja sebagai petani memperoleh penghasilan

setiap 4 (empat) bulan sekali. Lahan seluas 2200 m² dapat menghasilkan jagung sebanyak 16 kwintal (bila terserang hama). Harga jagung setiap kilogram Rp 3.100,- per Desember 2013, sehingga bila dikalikan maka menghasilkan Rp 4.960.000,- per empat bulan. Bila penghasilan petani selama empat bulan dikonversi setiap bulan maka menunjukkan hasil sebesar Rp 1.240.000,-. Jadi dapat disimpulkan bahwa penghasilan petani pemilik sawah dari panen jagung sebesar Rp 1.240.000,- per bulan.

Sementara produk pertanian jenis padi pun memberikan pemasukan yang sangat berarti bagi masyarakat Sudimoro. Namun, perolehan panen padi setiap empat bulan tersebut tidak selalu dalam bentuk uang. Dikarenakan sebagian petani menjual padi bila dibutuhkan, sebagian yang lain tidak menjualnya tetapi menggunakan untuk konsumsi pangan bagi keluarganya sehari-hari. Namun, bila dihitung produksi padi setiap masa panen memperoleh sebanyak 10-12 kwintal per pathok. Hal ini terjadi bila tanaman padi terserang hama wereng atau belalang. Bila tidak terserang hama mampu menghasilkan 1 (satu) ton. Harga padi setiap kilogramnya adalah Rp 8.000,- per Desember 2013. Sehingga secara keseluruhan selama empat bulan dari produksi padi petani mendapatkan uang sebesar Rp 8 juta sampai dengan Rp 80 juta. Bila dikonversi per bulan, setiap bulan mendapatkan Rp 2 juta sampai dengan 20 juta.¹³⁸ Namun, petani di Desa Sudimoro termasuk kategori

¹³⁸ Hasil FGD bulan Juli 2013 dan diverifikasi dengan pemetaan sosial melalui survey belanja rumah tangga per kepala keluarga oleh penulis bersama tim lokal Desa Sudimoro bulan November 2013.

petani gurem, yakni petani yang memiliki lahan sawah kurang dari satu hektar. Tanaman pertanian di persawahan Sudimoro pun tidak bebas dari serangan gulma dan hama yang selalu mengintai tanaman. Sehingga berimbas pada produktivitas lahan dan hasil setiap panennya.

Penghasilan per bulan yang diperoleh petani di atas adalah penghasilan. Belum dikurangi biaya operasioanal untuk tanam, perawatan dan panen. Mengenai biaya yang di keluarkan oleh pemilik sawah adalah seluruh biaya operasional yang berkenaan dengan sawah yang mereka pekerjaan kepada buruh tani. Biaya operasional tersebut meliputi biaya pupuk, pestisida, benih yang dibutuhkan oleh petani guna menunjang pertumbuhan tanaman, biaya untuk *mluku*¹³⁹ beserta sewa traktor, mobil pengangkut hasil panen dan upah yang diberikan kepada buruh tani. Upah buruh tani yang diberikan oleh pemilik sawah di ukur dari kualitas dan kuantitas pekerjaan yang dilakukan. Jika pekerjaan yang mereka kerjakan seperti menanam bibit padi, menanam benih jagung, dan *maton* maka upah yang mereka terima adalah Rp. 25.000,- dari pukul 06.00-11.00 WIB.

2) Petani Penggarap Sawah

Petani penggarap sawah adalah petani yang tidak memiliki lahan sawah. Petani jenis ini memiliki sawah karena mengolah lahan si pemilik sawah. Sistem pertanian jenis ini disebut *maroh* oleh masyarakat setempat. Maroh adalah suatu sistem yang mengatur pembagian hasil panen antara

¹³⁹ Mluku (Bahasa Jawa): mengolah lahan sawah sebelum ditanami

petani yang bekerja sebagai penggarap sawah dan pemilik sawah. Bagi hasil tersebut di takar dengan ukuran 50% : 50%. Misal, jika panen menghasilkan 4 (empat) kwintal maka bagian 2 (dua) kwintal untuk penggarap sawah dan 2 kwintal untuk pemilik sawah. Bila berupa uang pembagian pun sama 50 % : 50 %.

Dalam hal biaya operasional tanam, perawatan dan biaya panen sama halnya seperti petani pemilik sawah. Perbedaannya adalah pada jumlah pendapatan yang diperoleh. Jika petani pemilik sawah seluruh penghasilan dari bertani menjadi hak milik pribadi sedangkan petani penggarap harus membagi hasil panennya dengan si pemilik sawah. Pemilik sawah yang sawahnya digunakan oleh petani penggarap merupakan keluarga sendiri atau tetangga si penggarap. Di mana si pemilik sawah umumnya merupakan orang yang sudah lanjut usia dan anaknya telah memiliki keluarga dan pekerjaan yang mapan di perantauan sehingga anak tersebut telah jauh dari orang tuanya. Di samping itu, pemilik sawah yang telah berkecukupan ekonominya dan telah memiliki pekerjaan di luar sektor pertanian, misal mendirikan toko, memiliki home industri, sebagai karyawan pabrik, atau bekerja di luar daerah, pemilik sawah ini memilih *me-maroh*-kan sawahnya kepada orang lain.

Antara pemilik sawah dan penggarap telah ada kesepakatan selain sistem bagi hasil pertanian. Hal lain yang disepakati adalah biaya untuk tanam, perawatan dan panen, biaya ini secara keseluruhan ditanggung oleh si penggarap lahan. Si pemilik sawah tidak mengeluarkan biaya apapun kecuali

meminjamkan lahan dan bila panen, pemilik sawah mendapat sejumlah uang dari si penggarap.

3) **Petani Penyewa Sawah**

Selain dua macam klasifikasi petani seperti di atas, terdapat petani penyewa sawah. Petani ini menyewa lahan sawah milik orang lain selama batas waktu yang telah disepakati antara pihak pemilik tanah dan penyewa tanah. Lama penyewaan tergantung kesepakatan, dapat menyewa selama sekali masa tanam, atau satu tahun atau lebih. Lama penyewaan pun berpengaruh terhadap harga sewa. Bila menyewa selama 4 (empat) bulan atau sekali masa tanam, harganya Rp 3-4 juta. Alasan petani penyewa bermacam-macam, ada yang telah memiliki sawah di satu tempat kemudian menyewa agar dapat menanam jagung atau padi di tempat lain sehingga kepemilikan uang dapat diputar untuk pertanian. Ada pula petani yang memang tidak memiliki sawah untuk pertanian sehingga menyewa lahan.

4) **Buruh Tani**

Petani yang berada di Desa Sudimoro tidak semuanya memiliki sawah. Petani yang tidak memiliki sawah bekerja menjadi buruh tani dengan mengolah lahan pertanian para pemilik sawah atau petani yang *maroh*. Pekerjaan buruh tani harian di Desa Sudimoro dikenal dengan istilah *Buroh*. Waktu bekerja dari jam 06.00 sampai 12.00 WIB atau jam 06.00 sampai jam 16.00 WIB. Bila *buroh* dari jam 06.00 sampai 12.00 WIB memperoleh upah sebesar Rp 20.000,- sampai 25.000,- per orang, baik itu laki-laki ataupun

perempuan. Bila bekerja dari jam 06.00 sampai jam 16.00 WIB, seorang buruh tani mendapat upah sebesar Rp 35.000,-. Pekerjaan buruh tani biasanya *maton*, menanam bibit padi, menanam benih jagung atau tembakau, dan mengupas kulit jagung dari tongkolnya.

Buruh tani di Desa Sudimoro dibagi menjadi dua macam, yaitu buruh tani yang memiliki lahan sawah (milik pribadi) dan buruh tani yang tidak memiliki lahan sawah. Buruh tani jenis pertama ini biasanya mencari tambahan pemasukan dikarenakan hasil dari bertani



Gambar 5.1
Kesibukan Warga Saat Panen
Jagung Tiba

dari sawahnya kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan buruh tani jenis kedua menjadi buruh tani karena betul-betul menggantungkan dari pekerjaan ini. Pilihannya menjadi buruh tani dari pada bekerja di sektor lain disebabkan beberapa pertimbangan. Salah satunya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya adalah menjadi buruh tani. Pandangan mereka adalah lebih nyaman menjadi buruh tani, pandangan seperti ini disebabkan karena mereka kurang berminat dengan pekerjaan lain dan kurang memiliki kemampuan selain di bidang pertanian.

Demikian kondisi pertanian masyarakat Sudimoro, dalam sekali masa tanam (empat bulan) dapat memperoleh pendapatan sebesar kurang lebih Rp

4.650.000,- dari penjualan jagung 1,5 - 2,1 ton per 1 (satu) pathok, jumlah ini bisa didapatkan jika kondisi normal tanpa hama tikus. Jika terserang hama tikus, petani panen 12-16 kuintal saja. Sementara hasil tanam padi biasanya disimpan di rumah untuk kebutuhan konsumsi. Mereka akan menjual gabah padi jika kekurangan modal menjelang masa tanam.

“Orang sini itu bekerja sebagai petani, walaupun tidak memiliki lahan yang luasnya sampai 1 (satu) hektar. Kalau untuk kebutuhan beras, mayoritas warga tidak membeli karena sudah produksi sendiri dari lahan sawah. Tapi anehnya, ada bantuan raskin ke warga padahal warga sudah punya beras. Ya akhirnya dijual, berasnya juga kurang bagus,” jelas Slamet.¹⁴⁰

Dalam memenuhi kebutuhan pangan, penduduk mengandalkan pada sektor pertanian padi. Setelah panen, rata-rata masyarakat menyimpan padi di rumah dan digunakan sebagai sumber makanan pokok sehari-hari. Sebagian yang lain menjual beberapa kilogram berasnya untuk menambal kebutuhan belanja harian lainnya misalnya untuk membeli lauk pauk, kebutuhan sosial, dan kebutuhan yang sewaktu-waktu datang tidak terkira ketika tidak memiliki pasokan uang beberapa hari ke depan.

Berdasarkan hasil FGD bersama aparat Desa Sudimoro, tanggal 24 Desember 2013 menjelaskan bahwa semua warga Desa Sudimoro mendapatkan raskin kecuali PNS dan warga yang kaya. Raskin dibagikan secara merata oleh pemerintah desa. Dari pemerintah pusat pembagian tersebut hanya untuk

¹⁴⁰ Hasil FGD dengan Slamet (45 tahun), sekretaris RT 11 dan ibu-ibu warga Desa Sudimoro Dukuh Wajong Wetan RT.11, pada 15 Juli 2013.

penerima yang terdaftar dalam data pemerintah pusat. Ini merupakan kebijakan pemerintah desa agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan seperti di desa lain menyangkut dana bantuan dari pemerintah yang menyebabkan protes dan konflik di masyarakat karena adanya kesenjangan sosial. Berikut ini daftar warga Sudimoro Dusun I (RT 12-16) yang mendapatkan bantuan raskin,

Tabel 5.5
Daftar RTS Penerima Raskin Dusun I

RT	Nama KK Rumah Tangga Sasaran	RT	Nama KK Rumah Tangga Sasaran
RT 12	Bakri	RT 14	Mulyadi
	Marwanto		Widoyo
	Marani		Suripto
	Khumaedi		Suratman
	Malawi		Suparlan
	Sunyoto		Eksan
RT 13	Purjoko Jono Pawiro	RT 15	Maryono
	Yamto		Samsuri
	Mustajab		Suhadi
	Karsi		Sarjo
	Priyono		Bakir
	Sakim	Pareng	
	Marto Semi	RT 16	Wagito
Painem	Kromo surip		
RT 14	Suparman	RT 16	Suherman
	Rejo bejo		Giato
	Yatmiatun		Jumlah

Sumber: Hasil diskusi dengan Sri Wardoyo dan Jumeno, perangkat Desa Sudimoro, pada 27 Desember 2013 pukul 14.00 WIB

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penerima bantuan raskin yang termasuk dalam daftar kuota Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan data dari Kecamatan Tulung di Dusun I Desa Sudimoro terdapat 33 KK. Para penerima atau RTS ini mendapatkan beras 15 kilogram per RTS. Namun, oleh

pihak Pemerintah Desa Sudimoro, beras seberat 15 kilogram itu dibagi tiga orang, yaitu seorang RTS dan dua KK lainnya non RTS. Sehingga per KK mendapat 5 kilogram. Pemerintah Desa juga mengkhawatirkan jika penyaluran ini bocor sampai ke Pemerintah Kecamatan Tulung, sehingga mereka sangat berhati-hati untuk memberikan informasi mengenai para penerima bantuan raskin atau BLT di Desa Sudimoro, karena kebijakan ini merupakan kebijakan yang dipertimbangkan sendiri oleh Pemerintah Desa Sudimoro dan jajarannya agar tidak terjadi konflik sosial atau kecemburuan sosial di antara masyarakat yang dibawahinya.¹⁴¹ Sebagai contoh, berikut ini data penerima raskin berdasarkan kebijakan Pemerintah Desa Sudimoro di RT 12, Dukuh Gumuk Roto,

Tabel 5.6
Daftar Penerima Raskin Di RT 12

No.	Nama KK	Ket.	No.	Nama KK	Ket.
1.	Sunyoto	RTS	19.	Purwanto	
2.	Bu Cipto Hadi Mulyo		20.	Khumaedi	RTS
3.	Joko Budiono		21.	Tuginin	
4.	Sunarto		22.	Tuminem	
5.	Slamet Widodo		23.	Tukiman	
6.	Marjono		24.	Ngatijo	
7.	Marani	RTS	25.	Bu Supartini	
8.	Atmo		26.	Purjoko	
9.	Waliyem		27.	Joko Purwanto	
10.	Madi Suparto		28.	Marwanto	RTS
11.	Bu Sri Murah		29.	Pardi	
12.	Bakri	RTS	30.	Parinem	
13.	Dame Sri Widodo		31.	Wandi	
14.	Mbah Joyo		32.	Purjoko Jono Pawiro	RTS
15.	Jumadi		33.	Sri Pinuwun	
16.	Warto Suwito				

¹⁴¹ Hasil FGD dengan Jumeno, Sri Wardoyo, Purwaningsih, Supono, Muhajir, pada 27 Desember 2013, pukul 14.00 WIB dan diolah dari hasil wawancara dengan Ketua RT di Sudimoro.

17.	Suroso			
18.	Malawi	RTS	Jumlah : 33 KK	

Sumber: Hasil wawancara dan pemetaan dengan Supadi (65 tahun), Ketua RT 12, Dukuh Gumuk Roto, pada 03 Juli 2013

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah penerima raskin di RT 12 terdapat 33 KK. Jumlah KK di Dukuh Gumuk Roto terdapat 41 KK, berarti ada 8 KK yang tidak mendapatkan raskin yang merupakan warga kaya. Sementara terdapat sebuah persoalan bantuan tersebut yaitu tidak tepat sasaran dan kurang menyelesaikan persoalan. Di samping itu terdapat KK yang baru mendapatkan BLT dan raskin sebagai RTS mulai tahun 2011, yaitu Sunyoto warga Gumuk Roto. Sunyoto bekerja sebagai petani, ia memiliki sedikit lahan sawah seluas satu tugel pathok atau 1200 m². Selain pertanian ia bekerja sebagai buruh tani. Di mana per hari mendapatkan upah sebesar Rp 30.000,-.

Di Desa Sudimoro terdapat 240 KK yang masuk ke dalam data penerima BLSM dan raskin. Setiap KK mendapatkan beras sejumlah 5 kilogram. Bantuan raskin dari pemerintah sebesar 240 zak untuk 240 KK. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa adalah tidak hanya membagikan kepada 240 KK. Setiap zak memiliki berat 15 kilogram, jika dijumlah, berat total ada 3.600 kilogram dibagikan ke 3 (tiga) KK dengan jumlah 5 kilogram per KK. Sehubungan dengan pemegang data warga miskin sebagai penerima BLT atau BLSM dan raskin, baik carik, maupun aparat desa lainnya saling lempar tanggung jawab. Ketika melakukan FGD tersebut, Sri Wardoyo (Kaur Umum) dan Jumeno (Kaur Pemerintahan) menyatakan tidak memiliki data tersebut.

Mereka mengatakan bahwa data tersebut berada di Sekdes, semuanya disimpan di Kantor Desa Sudimoro. Hal ini sangat berlawanan dengan apa yang disampaikan oleh carik, Muhadjir, bahwa seluruh data daftar nama KK, para penerima bantuan raskin, BLSM, semua ada di Jumeno. Padahal ketika penulis berusaha mengkonfirmasi kepada Jumeno dan perangkat lainnya bahkan ke ketua RT, semua mengatakan bahwa data ada pada carik. Sri Wardoyo dan Jumeno hanya bisa membantu penulis untuk mengetahui warga terdaftar yang mendapat BLSM dan raskin dengan mengingat. Mereka hanya mampu mengingat nama-nama warga yang tinggal di RT 13-16 (wilayah Dusun I), wilayah ini merupakan tempat tinggal mereka. Sri Wardoyo tinggal di RT 14 sedangkan Jumeno tinggal di RT 16. Mereka mengetahui data penerima yang tinggal di RT 13 sampai RT 16 karena mengenal warga tersebut, dekat dengan anggota kelompok tani dan merupakan tempat hidup mereka dari kecil sampai dewasa di wilayah dusun yang sama.

Pembagian raskin dilakukan di masing-masing RT. Jarak dusun yang saling berjauhan hampir 1 km dan jarak RT yang berpencar-pencar sehingga pembagian lebih efektif dilakukan di masing-masing RT. Seperti di RT 2. Dalari, sebagai ketua RT membagikan raskin kepada warganya di *musholla* RT 2, yang tepat berada 3 meter di depan rumahnya. Ia mengumumkan pengambilan raskin kepada warga, kemudian warga mengambil ke *musholla*. Ketua RT bertugas mengambilkannya ke balai desa, selanjutnya untuk pembagian di serahkan kepada ibu-ibu PKK, termasuk istrinya. Ada dua KK yang terdaftar yang mendapat

raskin. Saat ini hanya ada dua KK. Sebelumnya terdapat 6 KK. Dalam pembagian, seluruh KK di RT 2 mendapat raskin, setiap KK mendapat 7 liter. Kondisi beras terkadang sudah tidak baik, ada kutu beras atau berjamur. Makaantisipasi beras yang didapat dicampur dengan beras yang mash baik. Berdasarkan penuturan Purwaningsih (35 tahun), beras yang didapat warga melalui raskin dijual kembali oleh warga penerima bantuan. Warga ini lebih menyukai beras hasil pertaniannya dari pada beras raskin karena kualitas raskin kurang baik dan rasanya tidak enak untuk dimakan.

b. Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)

Bantuan dari pemerintah yang juga kurang menyelesaikan permasalahan adalah jamkesmas. Sama seperti BLSM dan raskin, jamkesmas diberikan kepada penduduk miskin dan kelompok ekonomi menengah ke bawah. Hampir 90 persen penduduk Sudimoro mendapat bantuan kesehatan berupa kartu jamkesmas. Berdasarkan pendataan bulan November 2013, rata-rata penduduk lebih memilih berobat ke rumah sakit Islam, rumah sakit umum di daerah Boyolali, bidan, atau dokter praktek di rumah dari pada menggunakan layanan kartu jamkesmas untuk berobat. Warga lebih percaya tempat berobat tersebut dari pada di puskesmas. Saah satu alasan karena pelayanan dan obat-obatan lebih lengkap di tempat kesehatan selain puskesmas. Sebagaimana Purwaningsih, penderita vertigo tahunan ini sering memeriksakan di rumah sakit Islam daerah Boyolali

daripada di Puskesmas Tulung, karena selama bertahun-tahun ia berobat ke sana dan terbukti manjur dan obatnya lebih baik.

Puskesmas menjadi tempat berobat warga bagi warga yang miskin dan memiliki sakit yang tidak parah, seperti demam, linu, batuk atau flu, dengan membayar Rp 3.500,- bagi yang memiliki kartu jamkesmas. Bagi yang tidak memiliki kartu harus membayar sebesar Rp 15.000,- Sedangkan bila berobat ke rumah sakit atau dokter, menghabiskan biaya sebesar Rp 45.000,- sampai Rp 50.000,- (sakit ringan), bila sakit parah seperti asam urat atau gagal ginjal sekali periksa dapat menghabiskan Rp 100.000,- ke atas.

Secara garis besar, perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat Sudimoro dapat dikatakan masih minim. Walaupun tidak seluruhnya warga Sudimoro menunjukkan perilaku hidup yang tidak bersih dan sehat, ada pula sebagian warga yang tetap memperhatikan kesehatan dirinya dan lingkungannya. Misalnya adanya WC di masing-masing rumah, kamar mandi, tempat pembuangan sampah di pekarangan rumah. Namun ada pula warga yang belum memiliki WC yang melakukan BAB di kali atau got-got aliran sungai dekat pemukiman penduduk. Sepertinya mengenai kesehatan tentang sanitasi di wilayah desa Sudimoro ini adalah mengenai kebiasaan warga. Contohnya, di wilayah kadus I dan II yang ditemui penulis, bahwa walaupun sebuah KK telah memiliki kamar mandi lengkap dengan WC, anggota keluarga ini tetap memilih kali sebagai tempat mencuci baju, piring gelas dan mandi dengan nyaman dibanding menggunakan kamar mandinya masing-masing. *“Lebih enak mencuci dan mandi di kali mbak,*

kotorannya langsung ikut arus, kalau mencuci di rumah kan menghabiskan banyak air dan kotorannya tidak cepat hilang seperti di kali”, jelas Lastri (50) saat ditanya mengenai alasannya memilih kali dibanding kamar mandi.



Gambar 5.2
*Aliran Sungai di Sepanjang
Pemukiman Penduduk*



Gambar 5.3
*Aktivitas Ibu-ibu di Kalen Wajong
Kulon*

Untuk menangani warga yang sakit, telah terdapat seorang bidan desa di Desa Sudimoro. Bidan tersebut berkantor dan sekaligus bertempat tinggal di balai kesehatan desa yang terletak di sebelah selatan Balai Desa Sudimoro. Bidan tersebut menangani pasien dari warga Sudimoro baik balita, remaja, dan lansia. Bila berobat ke bidan tidak dipungut biaya jika waktu jam kerja, yaitu hari senin sampai dengan Kamis pada pukul 08.00-12.00 WIB, hari Jumat pada pukul 08.00-11.00 WIB. Bila pasien yang berobat diluar jam kerja maka dipungut biaya, misalnya pada sore hari, malam, atau pada hari Sabtu, Minggu, dan tanggal merah.

Penyakit ringan yang sering diderita oleh masyarakat biasanya penyakit ringan seperti batuk, pilek, sakit kepala, pegal, linu. Sedangkan penyakit berat

yang dialami oleh warga yaitu penyakit stroke, vertigo, darah tinggi dan thypus. Ketika sakit biasanya warga berobat di bidan desa, puskesmas, rumah sakit atau dokter praktek. Puskesmas yang dapat dijangkau dengan mudah dengan jarak yang tidak cukup jauh dari pemukiman adalah puskesmas Tulung, Rumah Sakit Islam Boyolali (yang memang letak Desa Sudimoro merupakan perbatasan antara wilayah Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali), atau dokter praktek di rumah di wilayah Boyolali.

Rata-rata lama sakit yang dialami oleh warga untuk penyakit ringan sekitar dua sampai empat hari. Warga mengatasi atau mengobati penyakit ringan yang dialami hanya dengan obat yang dijual di warung karena harganya lebih terjangkau sekitar Rp 500,- sampai Rp 1.000,-. Bila ke bidan menggunakan jamkesmas dan tidak dipungut biaya. Atau ke puskesmas menghabiskan biaya berobat sekitar Rp 15.000,- sampai dengan Rp 45.000,- sekali berobat. Sedangkan untuk penyakit berat sekitar 1-3 bulan bahkan sampai tahunan. Misalnya pasien penyakit gagal ginjal berobat ke rumah sakit menghabiskan biaya sebesar Rp 200.000,- setiap *chek up*. Sebagai contoh, Dalari, lelaki usia 58 tahun ini mengidap sakit ginjal selama hampir tiga tahun terakhir. Keluarganya tidak mendapatkan KK. Memang jika dilihat dari bangunan fisik rumah, keluarga ini memiliki rumah berdinding tembok dan jenis rumah gedong, namun jika ditelisik, ia merupakan buruh bangunan yang mendapat penghasilan sebesar Rp 50.000,- sampai dengan Rp 60.000,- per hari. Tiga tahun terakhir ia sakit ginjal dan cukup parah. Setiap satu minggu sekali ia periksa ke dokter di Boyolali dan

menghabiskan uang sebesar Rp 200.000,- setiap *check-up*. Ia mulai pesimis dan di wilayah RT 1-4, ia cukup terkenal dengan sakitnya tersebut namun dari pemerintah tidak memberikan bantuan jamkesmas. Banyak di antara warga yang mengeluhkan hal ini, ketua RW 4, pun menyayangkan pemerintah karena Dalari belum mendapatkan bantuan kesehatan.

Beban biaya yang dialami masyarakat, khususnya yang sakit dapat diperingan dengan kartu jamkesmas atau jamkesda dari pemerintah. Hampir 100% penduduk yang masuk kategori miskin dan kelas menengah ke bawah mendapatkan jamkesmas dari pemerintah, kartu tersebut memang bertujuan untuk mendapatkan pengobatan gratis sehingga masyarakat tidak merasa terbebani dengan biaya pengobatan tersebut. Hanya sebagian warga yang tidak mendapatkan jamkesmas atau jamkesda, warga tersebut adalah para perangkat desa, PNS, dan warga ekonomi kelas menengah ke atas. Walaupun telah memiliki kartu Jamkesmas, masyarakat masih menjatuhkan pilihannya untuk berobat ke sarana kesehatan yang lebih bagus dan dipercaya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat bukan orang yang tidak tahu apa yang terbaik untuk mereka. Hal ini berbeda dengan pandangan pemerintah bahwa rata-rata penduduk miskin tersebar di pedesaan sehingga masyarakatnya perlu dibantu dengan cara diberi bantuan kesehatan yang lebih murah dengan kartu Jamkesmas. Hal inilah yang menjadi salah satu bukti bahwa pembangunan di Indonesia masih pada tahap upaya kuratif untuk sekedar menyelesaikan permasalahan hidup yang dihadapi rakyat melalui program bantuan atau dalam bentuk uang, bukan bagaimana

menyelesaikan persoalan dengan tetap mengungkap potensi setempat, sumber daya lokal, kemandirian dalam memecahkan problem yang dihadapi oleh masyarakat sendiri dengan bergerak secara partisipatif.